

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS

2.1 Tinjauan Pustaka

Di dalam tinjauan pustaka ini, akan disajikan definisi-definisi penting dari istilah-istilah yang berhubungan dengan *E-Budgeting*, Transparansi, dan Akuntabilitas.

2.1.1 *E-Budgeting*

E-Budgeting (*Electronic Budgeting*) adalah sistem penyusunan, pelaksanaan, dan pelaporan anggaran yang dilakukan secara elektronik berbasis teknologi informasi.

2.1.1.1 Pengertian *E-Budgeting*

E-Budgeting didefinisikan sebagai sistem penyusunan anggaran yang dioperasikan melalui aplikasi perangkat lunak atau platform berbasis web, dengan fungsi utama membantu proses penganggaran di tingkat daerah. (Kamil et al., 2023) *E budgeting* oleh pemerintah daerah sangat penting untuk mencapai keterbukaan dalam pengelolaan keuangan daerah karena dapat memberikan informasi yang relevan kepada otoritas pemerintah (eksekutif dan legislatif).

Tujuannya adalah untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, efisiensi, dan efektivitas dalam pengelolaan keuangan pemerintah atau organisasi.

Menurut para ahli:

1. Bastian (2019:226):

E-budgeting merupakan sistem penganggaran yang memanfaatkan teknologi informasi untuk menyusun dan mengelola anggaran secara lebih transparan, efisien, dan dapat dipantau oleh publik.

2. (Pemerintah Republik Indonesia, 2019) tentang Pengelolaan Keuangan Daerah:

Penganggaran daerah harus dilakukan secara terintegrasi dengan sistem informasi keuangan daerah, termasuk *e-budgeting*, untuk menjamin keterpaduan dan akuntabilitas pengelolaan keuangan.

Pengambilan keputusan yang kompeten sangat diperlukan sebagai langkah awal dalam inisiatif masa depan untuk meningkatkan keterbukaan pengelolaan keuangan daerah. Salah satu alat pendukungnya adalah *E-budgeting*, yaitu program komputer berbasis web yang menggunakan metode penganggaran tertentu untuk memfasilitasi pencatatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Sebagai sistem keuangan berbasis web, *E-budgeting* menampilkan seluruh dokumen keuangan secara terbuka dan dapat diakses oleh siapa saja, sehingga menjadikannya jauh lebih transparan. Tujuan utama dari sistem yang berisi data anggaran dan keuangan daerah ini adalah untuk meminimalkan peluang penyalahgunaan dana oleh oknum. Selain itu, penggunaan teknologi informasi dalam pengelolaan keuangan ini merupakan langkah positif yang efektif dalam memacu kinerja aparatur negara.

Anggaran elektronik (*electronic budgeting*), atau yang sering disebut *E-budgeting*, adalah sistem keuangan yang disimpan secara digital (baik melalui web

maupun aplikasi), dengan tujuan utama keterbukaan (transparansi) bagi publik. Sistem ini digunakan untuk mendokumentasikan penyusunan anggaran di tingkat daerah. Dengan akses terbuka bagi siapa saja terhadap data anggaran yang disusun pemerintah, diharapkan dapat menghalangi tindakan penggelapan atau kecurangan oleh aparat daerah. *E-budgeting* adalah inisiatif *e-government* pemerintah yang berfokus pada peningkatan transparansi dan akuntabilitas dalam penganggaran..

2.1.1.2. Tujuan *E-budgeting*

Perusahaan pengembangan *software*, Mitra Mandiri Informatika (*e-budgeting* MMI), mengemukakan bahwa (Nasution & Rizqy Ramadhan, 2019):

1. *E-Budgeting* membuat data yang lebih akurat

Didukung oleh sistem informasi yang mutakhir, *e-budgeting* mampu menghasilkan analisis biaya yang akurat dan akuntabel. Dengan menganalisis laporan keuangan pendukung, *e-budgeting* membantu bisnis menyusun anggaran yang selaras dengan aktivitas perusahaan, sehingga menghasilkan nilai yang lebih tepat.

2. *E-Budgeting* membuat penyusunan menjadi lebih mudah

Dengan adanya aplikasi yang semakin canggih, proses penyusunan anggaran akan menjadi lebih mudah dan cepat. Tidak lagi memerlukan meeting terus menerus dan menghitung perkiraan biaya yang akan dikeluarkan. Tim budgeting hanya cukup untuk memasukan data-data yang diperlukan dan menganalisa bersama. Jika biasanya membutuhkan banyak kertas dan perlengkapan lainnya, sistem *e-budgeting* menekan semua itu. Hanya butuh satu aplikasi untuk menyusun anggaran.

3. Data lebih *transparan* & tidak mudah dimanipulasi akibat *e-budgeting*

E-budgeting memiliki sifat terbuka dan dapat diakses oleh siapa saja. Dalam sektor pemerintahan, sistem ini terbuka bagi seluruh masyarakat Indonesia. Sementara itu, dalam konteks bisnis swasta, *e-budgeting* dapat diakses oleh semua pihak internal perusahaan atau pihak-pihak lain yang memiliki kaitan langsung dengan operasional bisnis tersebut.

4. *Penyusunan RKA* lebih mudah

Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) didefinisikan sebagai dokumen gabungan perencanaan dan penganggaran. Isi RKA mencakup rencana pendapatan, rencana belanja untuk program dan kegiatan SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) dan K/L (Kementerian atau Lembaga Negara), serta memuat rencana pembiayaan, termasuk prakiraan proyeksi anggaran untuk tahun berikutnya.

5. Kemudahan membuat laporan

Keberadaan laporan keuangan dan perkiraan anggaran di dalam *e-budgeting* secara signifikan memudahkan tim terkait dalam menyusun laporan yang diperlukan. Tim kini hanya perlu satu kali akses tanpa harus mendatangi berbagai bagian atau divisi yang berbeda untuk mengumpulkan data. Semua informasi keuangan perusahaan ada dalam 1 aplikasi. *e-budgeting* bisa sebagai dasar membuat laporan laba rugi perusahaan, laporan neraca, laporan kinerja perusahaan, dan laporan lain yang menunjang proses operasional perusahaan.

6. Terintegrasi

E-budgeting memiliki kemampuan untuk diintegrasikan dengan sistem informasi keuangan lain yang dimiliki perusahaan. Hal ini mempermudah

penggabungan data yang dibutuhkan. Keuntungan lainnya adalah adanya sinkronisasi otomatis: jika terjadi penyesuaian atau perubahan pada anggaran, data lain yang terkait dengan *e-budgeting* akan ikut diperbarui secara otomatis. Dengan demikian, tim tidak perlu repot membuka dan merevisi laporan-laporan lainnya satu per satu.

2.1.1.3 Indikator *E-Budgeting*

Indikator utama keberhasilan penerapan *e-budgeting* mencakup (Supratno et al., 2021):

1. Transparansi – sistem *e-budgeting* memungkinkan masyarakat dan pihak internal mengetahui secara jelas proses penyusunan dan pelaksanaan anggaran.
2. Akuntabilitas – setiap proses anggaran terdokumentasi secara otomatis sehingga mudah diaudit.
3. Efisiensi dan Efektivitas – penggunaan sistem elektronik mempercepat proses dan menekan potensi kesalahan manual.

Indikator digunakan untuk mengukur sejauh mana penerapan *e-budgeting* berjalan efektif. Berikut beberapa indikator utamanya (Supratno et al., 2021):

1. Transparansi

Publik dapat mengakses dan memantau proses penyusunan hingga pelaksanaan anggaran secara terbuka.

2. Akuntabilitas

Adanya pertanggungjawaban yang jelas dari setiap tahapan anggaran melalui sistem yang terdokumentasi.

3. Efisiensi dan Efektivitas

Penggunaan sistem digital mempercepat proses, mengurangi biaya administrasi, dan menekan risiko kesalahan.

4. Integrasi Data

Semua proses keuangan (perencanaan, penganggaran, dan pelaporan) terhubung dalam satu sistem terpadu.

5. Kemudahan Akses dan Penggunaan

Pengguna (ASN/publik) dapat dengan mudah menggunakan sistem tanpa kendala teknis yang berarti.

6. Keamanan Data

Sistem *e-budgeting* harus memiliki perlindungan data agar tidak mudah dimanipulasi atau diretas.

2.1.2 Transparansi

Transparansi adalah keterbukaan dalam proses, informasi, dan pengambilan keputusan sehingga semua pihak yang berkepentingan dapat mengetahui dan memahami apa yang sedang dan telah dilakukan oleh suatu lembaga atau individu

2.1.2.1 Pengertian Transparansi

Transparansi yang dimaksud dalam penelitian ini adalah terbukanya akses bagi masyarakat dalam memperoleh informasi mengenai perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pertanggungjawaban Sistem *E-Budgeting*.

- Menurut Mardiasmo (2002:23): Transparansi adalah keterbukaan pemerintah dalam memberikan informasi yang terkait dengan aktivitas pengelolaan sumber daya publik kepada pihak-pihak yang membutuhkan informasi.

- Menurut Haryono (2003:46): Transparansi adalah asas yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mengakses informasi yang terkait dengan pengelolaan keuangan negara.
- Menurut Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik: Transparansi adalah asas yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mengakses informasi yang terkait dengan kegiatan pemerintah.

2.1.2.2 Prinsip – prinsip Transparansi

Tentang Keterbukaan Informasi Publik, prinsip-prinsip transparansi adalah Menurut (*Undang Undang No 14 Tahun 2008*, 2008):

- Keterbukaan: Informasi publik harus tersedia dan dapat diakses oleh masyarakat.
- Kejelasan: Informasi publik harus disajikan dengan jelas dan mudah dipahami oleh masyarakat.
- Ketepatan Waktu: Informasi publik harus disajikan pada waktu yang tepat dan tidak terlambat.
- Akuntabilitas: Badan publik harus bertanggung jawab atas kegiatan dan keputusan yang diambil.

Prinsip transparansi tidak hanya berhubungan dengan hal-hal yang menyangkut keuangan, transparansi pemerintah dalam perencanaan juga meliputi 5 (lima) hal sebagai berikut (Mustopadidjaya, 2002:261) :

1. Keterbukaaan dalam rapat penting dimana masyarakat ikut memberikan pendapatnya.

2. Keterbukaan Informasi yang berhubungan dengan dokumen yang perlu diketahui oleh masyarakat.
3. Keterbukaan prosedur (pengambilan keputusan atau prosedur penyusunan rancangan)
4. Keterbukaan register yang berisi fakta hukum (catatan sipil, buku tanah dll.)
5. Keterbukaan menerima peran serta masyarakat.

Transparansi anggaran adalah informasi terkait perencanaan penganggaran merupakan hak setiap masyarakat. Hak masyarakat yang terkait penganggaran yaitu (Mardiasmo, 2006:52):

- a. Hak untuk mengetahui
- b. Hak untuk mengamati dan menghadiri pertemuan Publik
- c. Hak untuk mengemukakan pendapat
- d. Hak untuk memperoleh dokumen publik
- e. Hak untuk diberi informasi

Beberapa prinsip transparansi yang diteliti dalam studi ini mencakup: keterbukaan informasi yang disajikan secara mudah dipahami oleh publik, publikasi rinci mengenai Anggaran Keuangan, dan penyediaan laporan berkala dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat mengenai pengelolaan Anggaran. Intinya, prinsip transparansi ini menciptakan rasa saling percaya antara masyarakat dan pemerintah berkat penyediaan informasi yang akurat dan memadai.

Transparansi berperan mengurangi ketidakpastian dalam proses pengambilan keputusan terkait pengelolaan dana desa. Dengan menyebarluaskan informasi yang sebelumnya hanya dimiliki pemerintah, masyarakat kini memiliki kesempatan

untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan, misalnya melalui musyawarah desa. Selain itu, keterbukaan ini secara efektif mempersempit peluang terjadinya tindak korupsi di lingkup pemerintah desa karena melibatkan partisipasi aktif masyarakat.

Aspek mekanisme pengelolaan anggaran harus dilakukan secara transparansi, ada hal-hal yang perlu diketahui yaitu (Tahir, 2011:163) :

1. Penetapan posisi jabatan
2. Kekayaan pejabat public
3. Pemberian penghargaan
4. Penetapan kebijakan
5. Kesehatan
6. Moralitas para pejabat dan aparatur pelayanan publik

Transparansi adalah nilai inti dalam sistem pemerintahan, dan seluruh aktivitas pemerintah harus berlandaskan pada prinsip ini. Saat ini, terdapat tuntutan publik yang semakin kuat terhadap transparansi yang lebih besar. Hal ini didorong oleh perkembangan cepat dan pengaruh pada organisasi swasta, seiring dengan peningkatan jumlah populasi masyarakat. Dengan demikian, permintaan masyarakat terhadap keterbukaan semakin menguat. Proses transparansi ini meliputi: (Tahir, 2011:164):

1. *Standard procedural requirements* (Persyaratan Standar Prosedur), bahwa proses pembuatan peraturan harus melibatkan partisipasi dan memperhatikan kebutuhan masyarakat.

2. *Consultation processes* (Proses Konsultasi), Adanya dialog antara pemerintah dan masyarakat
3. *Appeal rights* (Permohonan Izin), adalah pelindung utama dalam proses pengaturan. Standard dan tidak berbelit, transparan guna menghindari adanya korupsi.

2.1.2.3 Indikator Transparansi

Indikator dari transparansi berupa informatif adalah (Firnanda et al., 2025):

1. Tepat waktu. Laporan keuangan harus disajikan tepat waktu agar dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan ekonomi, sosial, politik serta untuk menghindari tertundanya pengambilan keputusan tersebut.
2. Memadai. Penyajian laporan keuangan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia mencakup dimuatnya pengungkapan informatif yang memadai atas hal-hal material.
3. Jelas. Informasi harus jelas sehingga dipahami sehingga tidak menimbulkan kesalahpahaman.
4. Akurat. Informasi harus bebas dari kesalahan-kesalahan dan tidak menyesatkan bagi pengguna yang menerima dan memanfaatkan informasi tersebut. Akurat juga berarti informasi harus jelas mencerminkan maksudnya.
5. Dapat diperbandingkan Laporan keuangan hendaknya dapat diperbandingkan antar periode waktu dan dengan instansi yang sejenis.
6. Mudah diakses. Informasi harus mudah diakses oleh semua pihak

2.1.3 Akuntabilitas

Akuntabilitas adalah kewajiban seseorang atau lembaga untuk mempertanggungjawabkan hasil pelaksanaan tugas, wewenang, dan penggunaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya kepada pihak yang berwenang atau berkepentingan, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

2.1.3.1 Pengertian Akuntabilitas

Akuntabilitas keuangan diartikan sebagai pertanggungjawaban atas integritas finansial, pengungkapan data, dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Bentuk pertanggungjawaban ini, menurut LAN dan BPKP (2000), berupa laporan keuangan dan mencakup kepatuhan terhadap regulasi yang mengatur penerimaan, penyimpanan, dan pengeluaran dana oleh instansi pemerintah. Melalui hasil laporan program yang telah dilaksanakan, masyarakat dapat menilai apakah pemerintah telah bekerja secara ekonomis, efisien, dan efektif. Akuntabilitas juga dapat dilihat dari perspektif akuntansi, perspektif fungsional, dan perspektif sistem akuntabilitas (Rinaldi, 2016:72).

Konsep akuntabilitas yang digunakan dalam penelitian ini merujuk pada pertanggungjawaban tim pelaksana pengelolaan Anggaran kepada masyarakat, dengan Bagian Administrasi Pembangunan bertindak sebagai penanggung jawab utama dan pencipta sistem. Konsep ini sejalan dengan pandangan para ahli, yang mendefinisikan akuntabilitas sebagai kemampuan untuk memberikan jawaban kepada otoritas yang lebih tinggi atas tindakan individu atau kelompok dalam suatu organisasi, yang juga berdampak pada masyarakat luas. (Syahrudin, 2003:8). Akuntabilitas mengacu pada kewajiban pertanggungjawaban bagi para pengambil

keputusan di organisasi sektor publik, swasta, dan masyarakat madani. Mereka harus mempertanggungjawabkan tindakan mereka kepada publik (masyarakat umum), di samping kepada pemilik kepentingan (*stakeholders*).

Dalam pasal 7 Undang- Undang (No.28, 1999) menjelaskan bahwa yang dimaksud asas akuntabilitas adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil dari kegiatan penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat/rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2.1.3.2 Aspek - Aspek Akuntabilitas

Akuntabilitas publik memiliki beberapa aspek penting, yaitu (Mardiasmo, 2018:27):

1. Akuntabilitas keuangan (*financial accountability*) pertanggungjawaban atas pengelolaan dana publik secara transparan dan sesuai peraturan.
2. Akuntabilitas kinerja (*performance accountability*) pertanggungjawaban atas hasil dan manfaat yang diperoleh dari penggunaan anggaran.
3. Akuntabilitas administratif (*administrative accountability*) pertanggungjawaban terhadap prosedur dan pelaksanaan kebijakan yang telah ditetapkan.
4. Akuntabilitas hukum (*legal accountability*) kepatuhan terhadap hukum, regulasi, dan ketentuan yang berlaku.
5. Akuntabilitas kebijakan (*policy accountability*) sejauh mana kebijakan publik yang dibuat dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.

2.1.3.3 Indikator Akuntabilitas

Terdapat tiga indikator yang membentuk akuntabilitas, yaitu keutuhan finansial (integritas keuangan), keterbukaan data (pengungkapan), dan ketaatan hukum. Sementara itu, akuntabilitas publik dilihat dari dimensi-dimensi berikut: (Ahmad Irwansyah, 2023, 239) :

1. Akuntabilitas hukum dan kejujuran

Akuntabilitas ini merupakan pertanggungjawaban yang berkaitan dengan aktivitas penegakan hukum dan norma kejujuran. Bentuk pertanggungjawaban ini bisa ditunjukkan dengan cara tidak melakukan berbagai macam penyalahgunaan dan wewenang yang dimiliki.

2. Akuntabilitas manajerial

Pertanggungjawaban yang disebut akuntabilitas ini berhubungan dengan bagaimana manajemen bekerja dan harus diwujudkan dalam pelaksanaan yang efisien dan efektif.

3. Akuntabilitas program

Jenis pertanggungjawaban ini berhubungan dengan setiap program yang dijalankan. Orang yang berwenang dalam program tersebut harus mampu menunjukkan bahwa program yang akan dibangun dapat berjalan dengan baik atau tidak. Selain itu, orang yang berwenang ini harus mampu menunjukkan upaya dan hal terkait yang telah dilakukan agar program yang dicanangkan berjalan optimal.

4. Akuntabilitas kebijakan

Pertanggungjawaban ini terkait dengan berbagai kebijakan dan keputusan yang telah ditetapkan oleh lembaga publik. Lembaga publik wajib mempertimbangkan dampak jangka panjang dari kebijakan yang mereka buat. Oleh karena itu, saat merumuskan kebijakan, perlu dijabarkan dengan jelas tujuan kebijakan tersebut dan alasan mengapa kebijakan tersebut harus dilaksanakan.

5. Akuntabilitas finansial

Pertanggungjawaban dalam konteks ini sudah pasti berhubungan dengan aspek keuangan. Perusahaan maupun lembaga pemerintah harus mampu menjelaskan asal-usul sumber dana, rincian penyerapan anggaran, dan berbagai bentuk pertanggungjawaban terkait penggunaan dana publik secara efisien dan efektif mungkin. Pemerintah secara khusus memiliki kewajiban untuk menyajikan laporan yang mencerminkan gambaran kinerja finansial mereka.

2.1.3.4 Penelitian Terdahulu yang Relevan

Penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini disajikan dalam tabel berikut ini

Tabel 2. 1 Perbandingan Penelitian Terdahulu

No.	Penelitian (Tahun)	Judul	Persamaan	Perbedaan	Hasil Penelitian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	(Arianto et al., 2025) https://doi.org/10.46730/jiana.v2i2i2.8253 SINTA S5	Implementasi <i>E-Budgeting</i> Dalam Transparansi Dan Akuntabilitas Keuangan Publik Pada Dinas Komunikasi Dan Informasi Kota Padang	Persamaanya terletak pada pembahasan tentang penerapan sistem <i>E-bugeting</i> . Transparansi dan Akuntabilitas.	Tempat penelitian Arianto & Audrey Amanda berada di Dinas Komunikasi dan Informasi Kota Padang, sedangkan peneliti melakukan penelitian di SMAN 1 Ciamis.	Implementasi sistem <i>E-Budgeting</i> di Diskominfo Kota Padang telah mentransformasi transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan publik secara signifikan. Pendekatan implementasi bertahap dengan integrasi sistem yang komprehensif meningkatkan efisiensi proses penganggaran dari 2-3 minggu menjadi 3-5 hari kerja dan menyediakan akses informasi secara real-time kepada para pemangku kepentingan.
2	(Priono et al., 2025) https://doi.org/10.70437/benefit.v3i1.1214 SINTA 5	Peran Pengawasan dan Program Efisiensi dalam Mewujudkan Transparansi Pemerintah: Perspektif <i>Good Governance</i>	Persamaanya terletak pada pembahasan tentang transparansi	Penelitian Utami Priona, Dinar Anggia & Agoesni Mappadang mengenai peran pengawasan dan tidak membahas mengenai <i>e-budgeting</i> , sedangkan peneliti melakukan penelitian bukti penggunaan <i>e-budgeting</i>	dua pilar tata kelola yang baik yang saling terkait adalah efisiensi dan transparansi. Alat utama untuk menegakkan akuntabilitas dan memfokuskan upaya efisiensi pada kepentingan publik adalah pengawasan yang efektif., mencapai keseimbangan antara keadilan sosial, efisiensi, dan pemberian layanan sangat penting bagi kemampuan pemerintah untuk berhasil menerapkan prinsip-prinsip ini.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
3	(Haris, 2025) https://doi.org/10.51577/jgpi.v5i1.752 SINTA 5	Transformasi Digital Pengelolaan Anggaran Dana Desa; Studi Tentang <i>E-Budgeting</i> , Transparansi dan Partisipasi Masyarakat	Persamaanya terletak pada pembahasan tentang sistem <i>e-bugeting</i> dan Akuntabilitas	Terdapat perbedaan dari penelitian Almuhajir Haris adalah dari objek penelitiannya.	Penerapan <i>e-budgeting</i> di Desa Lempang telah memberikan perubahan positif, namun diperlukan terus-menerus peningkatan kualifikasi aparatur desa dan peningkatan infrastruktur digital agar tata kelola keuangan desa bisa lebih baik lagi.
4.	(Firnanda et al., 2025) https://doi.org/10.61166/jiemt.v2i1.9 SINTA 3	Implementasi Sistem Anggaran Berbasis Teknologi dalam Meningkatkan Transparansi dan Akuntabilitas Keuangan	Persamaanya terletak pada pembahasan tentang sistem akuntabilitas dan Tranparansi.	Terdapat perbedaan saat mengambil data. Penelitian terdahulu bertujuan untuk meneliti peningkatan pada transparansi dan akuntabilitas. Sedangkan, Penelitian ini melihat pengaruh penggunaan <i>e-budgeting</i> .	Penerapan sistem anggaran berbasis teknologi terbukti mampu meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan. Dengan sistem ini, informasi keuangan dapat diakses dengan lebih terbuka, risiko penyalahgunaan dana berkurang, serta efisiensi dalam pengelolaan anggaran meningkat.
5.	(ADHISA NURAFIA RAHMA, 2022) https://doi.org/10.35446/akuntansikompetif.v6i1.1217 SINTA S5	Peran <i>E-Budgeting</i> Untuk Mendukung Transparansi Anggaran Pada Pemerintah Kota Surakarta	Persamaanya terletak pada pembahasan tentang sistem <i>e-bugeting</i> , dan Tranparansi.	Terdapat penelitian Adhisa Nurafia Rahma & Utpala Rani di Pemerintahan Kota Surakarta dan meneliti transparansi saja. sedangkan peneliti melakukan penelitian mengenai transparansi dan akuntabilitasnya di SMAN 1 Ciamis.	Data yang transparan dapat digunakan dalam implementasi <i>E Budgeting</i> untuk menunjukkan sistem keuangan yang dialokasikan dan dapat menjadi pengukur seberapa efektif pemerintah telah memanfaatkan anggarannya. Kota Surakarta sendiri telah menerapkan sistem <i>E-Budgeting</i> sejak tahun 2017 terbukti dimana data yang dapat diakses dari tahun 2017. mampu mendukung pencapaian akuntabilitas dan transparansi Pemerintah Kota Surakarta sekaligus sebagai upaya mewujudkan <i>good governance</i> .

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
6.	(Operasional et al., 2025) https://doi.org/10.58222/jemakb.d.v4i2.1369 SINTA 5	Peran Inovasi Teknologi Keuangan (Fintech) dalam Transformasi Sistem Manajemen Keuangan Perusahaan dan Implikasinya terhadap Efisiensi Operasional dan Transparansi Informasi	Persamaanya terletak pada pembahasan tentang Transparansi.	Terdapat penelitian Ahmad Wahyudin, Faisol & Sendy Yulianto menganalisis peran inovasi. sedangkan peneliti melakukan penelitian pengaruh <i>e-budgeting</i> .	integrasi fintech dalam sistem manajemen keuangan bukan sekadar inovasi teknis, melainkan strategi manajerial yang mampu membentuk budaya kerja yang efisien dan transparan. Temuan ini dapat menjadi dasar penyusunan strategi digitalisasi keuangan perusahaan serta referensi kebijakan dalam mendukung transformasi keuangan berbasis teknologi di sektor bisnis.
7.	(Apriliani et al., 2023) https://doi.org/10.33395/owner.v7i1.1289 SINTA S3	Pengaruh <i>E-Planning</i> , <i>E-Budgeting</i> , dan <i>EProcurement</i> Terhadap Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah	Persamaanya terletak pada pembahasan tentang <i>e-budgeting</i> dan Akuntabilitas.	Terdapat penelitian Allysa Sekar Apriliani & Novi Dirgantari menganalisis tentang Pengaruh <i>E-Planning</i> , <i>E-Budgeting</i> , dan <i>EProcurement</i> dan keuangan daerah. sedangkan peneliti melakukan penelitian pengaruh <i>e-budgeting</i> di SMAN 1 Ciamis.	Tekanan Eksternal (X1) secara parsial berpengaruh signifikan terhadap Transparansi Laporan Keuangan (Y). Dengan banyaknya aspirasi masyarakat dan peraturan pemerintah yang menuntut adanya transparansi keuangan, maka Organisasi Perangkat Daerah harus mengikuti sesuai dengan ketentuan dan permintaan yang ada.
8.	(Yomitami & Subekti, 2021) https://doi.org/10.24905/jabko.v1i2.19 SINTA 5	Pengaruh Tekanan Eksternal, Implementasi <i>E-Budgeting</i> , dan Aksesibilitas terhadap Transparansi Laporan Keuangan pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kota Tegal	Persamaanya terletak pada pembahasan tentang pengaruh <i>e-budgeting</i> dan Transparansi	Terdapat penelitian Sela Ayu Yomitami & Subekti menganalisis di OPD Kota Tegal. sedangkan peneliti melakukan penelitian pengaruh <i>e-budgeting</i> di SMAN 1 Ciamis.	Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa struktur birokrasi, sumber daya, komunikasi dan disposisi memiliki pengaruh penting dalam implementasi <i>e-budgeting</i> .

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
9.	(Nasution & Rizqy Ramadhan, 2019) https://doi.org/10.24843/EJA.2019.v28.i01.p26 SINTA 5	Pengaruh Implementasi <i>E-Budgeting</i> terhadap Transparansi Keuangan daerah di Indonesia	Persamaan nya sama sama membahas mengenai Implementasi <i>E-Budgeting</i> terhadap transparansi keuangan	Perbedaan pada penelitian ini tidak ada variabel akuntabilitas dan Tempat penelitian	Bahwa implementasi <i>E-budgeting</i> berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap transparansi keuangan daerah di Indonesia.
10.	(Marpaung & Patriansyah, 2025) https://doi.org/10.55681/sentri.v4i9.4468 SINTA 4	Pengaruh Implementasi Model Transformasi Digital dan Smart Governance Terhadap Efisiensi dan Akuntabilitas Keuangan Pemerintah Daerah di Tapanuli Selatan	Persamaan nya sama sama membahas mengenai Akuntabilitas keuangan	Terdapat perbedaan penelitian ini yaitu tempat penelitiannya di pemerintah daerah di Tapanuli Selatan	Implementasi transformasi digital di Pemerintah Daerah Tapanuli Selatan berperan signifikan dalam meningkatkan efisiensi dan akuntabilitas keuangan. Adopsi sistem digital seperti e-planning dan <i>e-budgeting</i> terbukti mampu menyederhanakan proses administrasi, menghemat waktu, dan menciptakan transparansi dalam pengelolaan anggaran

Sumber: Data diolah Penulis, 2025.

2.2 Kerangka Pemikiran

Sekolah dapat menjadi sarana penting dalam mengelola dan memperoleh keuangan guna mendukung kegiatan pendidikan. Melalui dana dari pemerintah, iuran peserta didik, serta bantuan pihak swasta atau masyarakat, sekolah dapat memenuhi kebutuhan operasional seperti gaji guru, perawatan fasilitas, dan penyediaan sarana belajar. Pengelolaan keuangan yang baik dan transparan akan membantu sekolah meningkatkan kualitas pembelajaran serta menciptakan lingkungan pendidikan yang nyaman dan berkelanjutan.

Meskipun pengelolaan keuangan yang baik adalah kunci bagi sekolah yang maju, masalah yang sering dihadapi oleh pemangku kepentingan justru terletak

pada pengelolaan dana. Persoalan ini disebabkan oleh minimnya keterbukaan dan akuntabilitas pihak sekolah kepada *stakeholders* dalam urusan keuangan. Faktor lain yang turut menjadi penyebab adalah kurangnya partisipasi *stakeholders* dalam proses perencanaan dan manajemen anggaran. Dengan kata lain, sekolah belum menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam mengelola keuangannya.

E-Budgeting, yakni sistem penganggaran berbasis web atau perangkat lunak yang memfasilitasi anggaran daerah (Rahman, 2018), memiliki peran yang sangat penting bagi pemerintah daerah. Tujuannya adalah mencapai transparansi dalam manajemen keuangan daerah dengan memberikan informasi yang dibutuhkan kepada pihak eksekutif dan legislatif.

Jika sistem *e-budgeting* telah diterapkan oleh tim pengelola dana Biaya Operasional Pendidikan Daerah, maka pemerintahan yang *Good governance* akan terwujud, dimana pengelolaan telah dilakukan secara transparan dan akuntabel. *Good Governance* merupakan penyelenggaraan negara yang berorientasi pada tujuan yang baik (Soelendro, 2000). Dalam pelaksanaannya, *good governance* mencakup perumusan kebijakan yang terikat pada masalah sosial dan sistem nilai organisasi, berlaku universal dalam sistem demokrasi. Setiap pelaksanaan *good governance* selalu didukung oleh tiga prinsip esensial: transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas

Hal ini selaras dengan Penelitian terdahulu yang diteliti (Haris, 2025) dengan judul Transformasi Digital Pengelolaan Anggaran Dana Desa; Studi Tentang *E-Budgeting*, Transparansi dan Partisipasi Masyarakat, yang hasil dari penelitian ini Penerapan *e-budgeting* di Desa Lempang telah memberikan perubahan positif,

namun diperlukan terus-menerus peningkatan kualifikasi aparatur desa dan peningkatan infrastruktur digital agar tata kelola keuangan desa bisa lebih baik lagi.

Transparansi merujuk pada keterbukaan pemerintah untuk menyajikan informasi mengenai pengelolaan sumber daya publik kepada masyarakat (Mardiasmo, 2002:31). Dalam penelitian ini, transparansi berfokus pada ketersediaan akses informasi publik mengenai penyaluran, pengelolaan, dan hasil Dana SIPD. Jika suatu lembaga pendidikan tidak transparan, ia akan memicu kecurigaan publik, sebab keterbatasan akses informasi dapat menyebabkan hilangnya kepercayaan. Sebaliknya, keterbukaan akses informasi akan memperkuat kepercayaan publik. Indikator untuk mengukur transparansi ini adalah: akurat, jelas, memadai, tepat waktu, mudah diakses, dan dapat diperbandingkan.

Hal ini selaras dengan penelitian terdahulu yang diteliti oleh (Nasution & Rizqy Ramadhan, 2019) dengan judul Pengaruh Implementasi *E-Budgeting* terhadap Transparansi Keuangan daerah di Indonesia yang diteliti dengan hasil penelitian Bahwa implementasi *E-budgeting* berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap transparansi keuangan daerah di Indonesia.

Dalam pasal 7 Undang- Undang (No.28, 1999) menjelaskan bahwa yang dimaksud asas akuntabilitas adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil dari kegiatan penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat/rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Akuntabilitas yaitu pertanggungjawaban tim pelaksana pengelolaan Dana Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) kepada masyarakat, dimana kepala

sekolah sebagai penanggungjawab utamanya. Lembaga pendidikan yang akuntabel akan menimbulkan dampak positif dan kepercayaan publik terhadap pengambilan keputusan dan kebijakan yang ada. Dengan demikian pengelolaan dana pendidikan akan berjalan baik sesuai dengan tujuan sistem pendidikan nasional yang ada. Maka selaras dengan hal tersebut indikator dari akuntabilitas ialah Hukum dan kejujuran, akuntabilitas manajerial, akuntabilitas program, akuntabilitas kebijakan, akuntabilitas finansial.

Hal ini selaras dengan penelitian terdahulu yang diteliti oleh Oleh (Arianto et al., 2025) Implementasi *E-Budgeting* Dalam Transparansi Dan Akuntabilitas Keuangan Publik Pada Dinas Komunikasi Dan Informasi Kota Padang mengemukakan bahwa Implementasi sistem *E-Budgeting* di Diskominfo Kota Padang telah mentransformasi transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan publik secara signifikan. Pendekatan implementasi bertahap dengan integrasi sistem yang komprehensif meningkatkan efisiensi proses penganggaran dari 2-3 minggu menjadi 3-5 hari kerja dan menyediakan akses informasi secara *real-time* kepada para pemangku kepentingan.

Maka, kerangka pemikiran pada penelitian ini akan menjelaskan adanya hubungan antara penerapan *E-budgeting* terhadap transparansi dan akuntabilitas keuangan. Dan penerapan sistem *E-budgeting* besar pengaruhnya terhadap transparansi dan akuntabilitas keuangan sekolah. Berdasar pada latar belakang dan landasan teori pada bab terdahulu.

2.3 Hipotesis Penelitian

Berdasarkan kerangka pemikiran, maka dapat dibuatkan hipotesis penelitian, yaitu :

Terdapat Pengaruh Penerapan *E-Budgeting* Terhadap Transparansi dan Akuntabilitas Keuangan.